



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 01 September 2026

Halaman: 5

► KAWASAN PEDESTRIAN

Kantong Parkir Harus Jadi Prioritas

JOGJA—Rencana penerapan kawasan Malioboro secara penuh sebagai kawasan pedestrian perlu dibarengi kesiapan kantong parkir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak hanya menata kawasan pedestrian, tetapi juga memastikan kebutuhan parkir bagi masyarakat dan berbagai moda transportasi terpenuhi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiyat Nujanat, mengatakan penataan kawasan pedestrian didukung DPRD Kota Jogja. Namun, ketersediaan sarana pendukung, terutama fasilitas parkir, harus menjadi perhatian sebelum penerapan kawasan secara penuh.

"Pedestrian di Kota Jogja ini memang sudah menjadi kawasan yang menurut saya sudah tidak nyaman karena lalu lintasnya terlalu *crowded*, terlalu macet, terlalu padat. Kemudian fasilitas parkirnya juga relatif belum memadai," ujarnya, Minggu (30/8).

Menurut Sinarbiyat, kantong parkir perlu tersedia di lokasi yang tidak terlalu jauh dari kawasan pedestrian. Dengan begitu, kebutuhan kendaraan tetap dapat terakomodasi tanpa menimbulkan persoalan baru di sekitar Malioboro.

Pemkot Jogja, kata dia, dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY apabila membutuhkan pemanfaatan aset milik Pemda DIY untuk menyediakan kantong parkir. "Kalau asetnya Pemda DIY, tentu harapannya Pak Wali Kota bisa komunikasi dengan Pemda DIY untuk bagaimana mencari solusi terkait kantong parkir ini dapat terakomodasi dan terselesaikan dengan baik," katanya.

Sinarbiyat mengingatkan ketidaksiapan fasilitas parkir dapat memicu persoalan lain. Salah satunya munculnya parkir liar di sekitar kawasan pedestrian yang berpotensi menimbulkan kemacetan baru.

Selain itu, kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sinarbiyat juga menyoroti masih adanya oknum yang menarik tarif parkir secara berlebihan.

Menurutnya, praktik tersebut dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan berpotensi merusak citra Jogja sebagai kota pariwisata dan budaya.

"Jangan sampai karena ketidaksiapan itu berdampak pada munculnya parkir-parkir liar di sirip-sirip jalan di kawasan pedestrian. Justru menimbulkan kemacetan baru dan praktik pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Sinarbiyat membandingkan persoalan parkir dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro. Menurutnya, PKL telah memiliki wadah melalui Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Namun, persoalan ruang untuk kendaraan dan berbagai moda transportasi masih perlu mendapatkan perhatian.

"Kalau PKL saya kira sudah diwadahi dengan Teras 1, Teras 2. Nah, parkir ini sampai hari ini masih belum cukup memadai," ucapnya.

Kebutuhan kantong parkir, lanjut dia, bukan hanya menyangkut kendaraan pribadi. Ruang juga perlu disiapkan untuk mendukung aktivitas transportasi dan pekerja yang beraktivitas di kawasan Malioboro.

(Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005